

ANALISIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERKOTAAN (Studi kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)

Mohamad Rizal*

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of waste management in the City of Donggala and to know the factors which will influence waste management in the City of Donggala.

This research has been done in the area of the town of Donggala in 2003. Data were collected through observation, using a questionnaire to 100 respondents and the survey interviews. Technical data analysis done by dividing the survey data into the two types of variables: independent variable (X) and the dependent variable (Y).

The results find that the management of waste in the City of Donggala is good enough. Some factors that affect waste management in the City of Donggala is community participation, education levels of staff and number of garbage workers.

Key words : waste management, District of Donggala

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Donggala serta mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kota Donggala.

Penelitian ini telah dilakukan di dalam wilayah kota Donggala pada Tahun 2003. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, dengan menggunakan kuisioner kepada 100 orang responden serta survei wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan membagi data hasil survey ke dalam dua tipe variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel tidak bebas (Y).

Hasil penelitian mendapatkan bahwa pengelolaan persampahan di Kota Donggala sudah cukup baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kota Donggala adalah partisipasi masyarakat, tingkat pendidikan staf dan jumlah tenaga kebersihan.

Kata Kunci : Pengelolaan sampah, kabupaten Donggala

1. Pendahuluan

Tingginya eskalasi urbanisasi, menjadikan pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu pelayanannya adalah penanggulangan kebersihan lingkungan pemukiman. Akibat tuntutan serta aspek pelayanan yang harus disediakan menjadikan pemerintah daerah harus lebih serius terhadap masalah persampahan. Persampahan adalah ;"hal (keadaan) sampah

(kotoran), Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2000 : 777",.

Persoalan sampah tidak henti-hentinya untuk dibahas, karena berkaitan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Olehnya penanggulangan sampah bukan hanya urusan pemerintah semata akan tetapi penanganannya membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas.

Dalam hal penanganan sampah dapat diasumsikan bahwa laju produksi sampah tidak sebanding dengan proses

* Staf Pada Subdina Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah

penanganannya. Hal tersebut tentu memacu pemerintah daerah untuk lebih awal memikirkan bagaimana strategi yang efisien dalam menanggulangi masalah persampahan. Dalam kapasitas kota sebagai sumber pemenuhan kebutuhan manusia maka sudah seyogyanya untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan persampahan yang baik.

Jika masalah persampahan tidak ditangani sebagaimana mestinya, maka dapat menimbulkan berbagai masalah, sampai pada resiko bagi kesehatan manusia serta makhluk lainnya. Pengelolaan persampahan yang baik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangannya. Setiap kegiatan tersebut

berkaitan antara satu dengan lainnya dan saling berhubungan timbal balik.

Perkembangan produksi sampah setiap harinya mengalami peningkatan yang cukup tajam, olehnya diharapkan agar pengelolaannya juga dilaksanakan secara efektif dan efisien. Namun demikian, berdasarkan pengamatan empiris terlihat bahwa antara produksi sampah dengan kemampuan untuk mengelola sampah tersebut tidak seimbang. Penyebabnya adalah terbatasnya sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah. Permasalahan ini bukan hanya akan menjadi masalah jangka pendek, tetapi akan menjadi masalah jangka panjang, sehingga perlu disentuh dengan kebijakan pemerintah daerah, dengan demikian maka penanganannya akan lebih terintegrasi dengan hasil maksimal. Masalah persampahan terjadi antara lain karena semrawutnya pola pemukiman dan pesatnya

pertambahan jumlah penduduk. Maka salah satu aspek yang sedang diupayakan adalah sarana dan prasarana yang memadai sebagai media utama untuk pengelolaan persampahan.

Kota Donggala yang merupakan Ibukota Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, sebagai kota yang sedang tumbuh juga diperhadapkan dengan masalah persampahan yang tentunya berkenaan dengan keasrian dan keindahan serta kebersihan kota. Keberadaan Kota Donggala sebagai ibukota kabupaten yang terletak diantara poros lintas Sulawesi tentunya harus melakukan terobosan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai program guna mewujudkan Kota Donggala sesuai dengan motto kotanya yaitu kota ANTIK (Aman, Nyaman, Tertib, Indah dan Kenangan).

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut ;

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kota Donggala.
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam pengelolaan persampahan di Kota Donggala.

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Penataan Wilayah Kabupaten Donggala.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kota Donggala.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Sampah

Secara umum masyarakat mengenal sampah sebagai sesuatu benda yang dihasilkan dari berbagai

benda yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi oleh manusia. Pengertian sampah dalam modul Materi Training Untuk Tingkat Staf Teknis Proyek PLP Sektor Persampahan : 1986 Bab II : 1) adalah ;

“Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat , dari bahan organik dan atau anorganik, baik benda logam maupun bukan logam yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar.”

Sedangkan pengertian limbah adalah :

“ Limbah adalah suatu benda yang saat itu dianggap tidak berguna lagi, kehadirannya tidak diinginkan dan tidak disenangi, harus segera disingkirkan, merupakan benda buangan yang timbul dari lingkungan masyarakat normal. Bentuk limbah adalah : padat, cair dan gas. ”

Dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala telah diformulasikan suatu pengertian sampah yang diatur dalam Perda No 10 tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan : Bab I : Pasal 1 : Point 7) , bahwa sampah adalah :

“Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari bahan organik dan non organik, logam dan non logam yang dapat terbakar, tidak termasuk buangan biologis atau kotoran manusia dan sampah berbahaya.”

Pengertian sampah secara khusus dikemukakan oleh Azwar A. (1979 : 54) adalah :

“sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi bukan biologis karena (human waste) tidak termasuk didalamnya.”

Sedangkan menurut Mochtar M. (1987 : 55) sampah adalah :

“ sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya ”

Berdasarkan rumusan pengertian dan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampah ialah semua jenis benda atau barang bangunan/kotoran manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan atau yang berasal dari aktivitas kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang dapat menimbulkan dan atau mengakibatkan pengotoran terhadap air, tanah dan udara sehingga dapat menimbulkan pengrusakan lingkungan hidup manusia.

2.2 Penggolongan sampah

Sampah dapat digolongkan kedalam beberapa golongan yang didasarkan pada asalnya, yaitu;

- a. Pasar, tempat-tempat komersil.
- b. Pabrik-pabrik atau industri.
- c. Rumah tinggal kantor, sekolah, institusi, gedung-gedung umum, dan lain-lain serta pekarangannya.
- d. Kadang hewan atau pematangan hewan.
- e. Jalan, lapangan dan pertamanan.

- f. Sekolah, riol dan septik tank.
- g. Dan lain sebagainya.

Sedangkan pembagian atau penggolongan sampah menurut sumbernya adalah :

- a. Sampah domestik, sampah ini berasal dari lingkungan pemukiman atau perumahan ;
- b. Sampah komersil, sampah yang dihasilkan dari lingkungan kegiatan perdagangan seperti toko, restoran, rumah makan, warung, pasar dan swalayan ;
- c. Sampah industri, sampah ini merupakan hasil samping kegiatan industri yang jenisnya sangat tergantung pada kegiatan industri itu sendiri ;
- d. Sampah alami dan lainnya, dapat berupa dedaunan, sisa bencana alam dan sebagainya.

Berdasarkan sifatnya sampah dapat digolongkan menjadi:

- a. Sampah yang mudah membusuk ;
- b. Sampah yang tidak mudah membusuk ;
- c. Sampah yang mudah terbakar ;
- d. Sampah yang tidak mudah terbakar

2.3 Pengelolaan sampah

a. Tipe pengelolaan sampah

Pada dasarnya terdapat 2 macam pengelolaan sampah, yaitu pengelolaan / penanganan sampah setempat (individu) dan pengelolaan sampah terpusat untuk suatu lingkungan permukiman atau kota.

Penanganan setempat adalah penanganan yang dilaksanakan sendiri oleh sipenghasil sampah. Sedangkan pengelolaan secara terpusat, khususnya dalam teknis operasional, adalah suatu proses atau kegiatan penanganan sampah yang terkoodinir.

Jika yang akan dilaksanakan adalah sistem penanganan yang terpusat, maka adanya suatu institusi yang menangani langsung pengelolaan persampahan mutlak diperlukan. Institusi dalam sistem pengelolaan persampahan memegang peranan yang sangat penting meliputi, status, struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi vertikal maupun horisontal dari badan pengelola.

Sesuai dengan status kota, untuk kota metropolitan dan kota besar, bentuk badan pengelola sebaiknya suatu "Dinas" tersendiri dan selanjutnya dikembangkan menjadi bentuk Perusahaan Daerah".

Kotamadya sebaiknya merupakan Dinas tersendiri sedangkan Kota Administratif sebaiknya merupakan Suku Dinas Kebersihan atau UPTD dibawah Dinas Kebersihan atau Dinas PU Kabupaten.

Ibu Kota Kabupaten sebaiknya merupakan UPTD dibawah Dinas PU/Dinas Kebersihan Kabupaten atau Seksi dibawah Dinas PU Kabupaten. (Manual sistem pengelolaan sampah perkotaan : 4).

b. Organisasi dan personil

Adapun struktur organisasi hendaknya disusun dengan mempertimbangkan kriteria ; pola kerja, beban kerja, pengendalian, rentang kendali dan pedoman. Sedangkan dalam hal kebutuhan personil, maka sebaiknya mempertimbangkan faktor kemampuan. Jumlah personil dalam organisasi pengelola persampahan harus mencakup kebutuhan tenaga staf dan tenaga operasional.

Untuk memudahkan perhitungan kebutuhan personil, dapat dilakukan dengan pendekatan setiap 1000 (seribu) jiwa penduduk dibutuhkan 2 (dua) orang petugas. (Manual sistem pengelolaan sampah perkotaan : 4).

c. Peraturan-peraturan

Pengelolaan persampahan suatu daerah sangat ditentukan oleh peraturan yang mendukungnya. Peraturan-peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi.

Macam-macam peraturan daerah yang merupakan dasar hukum bagi pengelolaan persampahan adalah ;

- a. Peraturan daerah yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan yang ditujukan bagi masyarakat.
- b. Peraturan daerah mengenai pembentukan institusi formal.
- c. Peraturan daerah yang menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.

d. Operasional

Teknik operasional pengelolaan persampahan dimulai dari pewadahan/penyimpanan pada sumber sampah, kegiatan pengumpulan, pengangkutan serta pembuangannya disuatu tempat yang aman serta tidak mengganggu lingkungan baik manusia, flora dan fauna atau sumberdaya lainnya.

2.4 Pengelolaan sampah perkotaan

Dalam pengelolaan persampahan terutama untuk daerah perkotaan, harus dilaksanakan secara tepat dan sistematis.

a. Teknik operasional

Teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan terdiri dari kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir yang bersifat terpadu. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah perkotaan yaitu ;

- Rencana penggunaan lahan.
- Kepadatan dan penyebaran penduduk.
- Karakteristik lingkungan fisik, biologi dan sosial ekonomi.
- Kebiasaan masyarakat.
- Karakteristik sampah.
- Peraturan-peraturan/aspek legal nasional dan daerah setempat.
- Sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.
- Lokasi pembuangan akhir.
- Biaya yang tersedia.
- Rencana tata ruang dan pengembangan kota.
- Iklim dan musim. (SK SNI T – 13 – 1990 – F : 3)

Kegiatan pengelolaan persampahan akan melibatkan penggunaan dan pemanfaatan berbagai prasarana dan sarana persampahan yang meliputi pewadahan pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan maupun pembuangan akhir.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, akan dilakukan dengan teknik analisa kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono. 1999 : 7), sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif.

3.2 Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2003. Obyek penelitian ini dilakukan di dalam wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa, yaitu dengan mengambil lokasi di Kelurahan Boya, dimana kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan yang saat ini telah terlayani oleh pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Permukiman dan Penataan Wilayah.

3.3 Populasi dan sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga/ dalam wilayah Kelurahan Boya, aparat kelurahan, serta staf dan tenaga kebersihan pada Seksi Kebersihan di Dinas Permukiman dan Penataan Wilayah Kabupaten Donggala.

Adapun jumlah populasi dari tiap jenisnya adalah ;

- a. Staf seksi kebersihan = 7 orang.
- b. Tenaga kebersihan sebanyak = 44 orang.
- b. Aparat kelurahan sebanyak = 11 orang.
- c. Rumah tangga sebanyak = 782

Dalam penentuan sampel, peneliti menggunakan teknik penarikan dengan metode *Simple Random Sampling*.

Penelitian ini diambil sampel, dengan uraian seperti berikut.

- a. Staf seksi kebersihan = 4 orang.
- b. Tenaga kebersihan sebanyak = 10 orang.
- b. Aparat kelurahan sebanyak = 6 orang.
- c. Rumah tangga sebanyak = 80.

J u m l a h = 100 responden.

3.4 Pengumpulan dan analisis data

Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan cara :

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan.
- b. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan format isian yang disebarikan pada responden yang bertujuan untuk mendapatkan data primer.
- c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan pada responden, dengan mengadakan komunikasi secara langsung.

Teknik analisis data adalah membagi data penelitian ke dalam dua variable yaitu variable bebas X dan variable terikat Y.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pengelolaan persampahan

Sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Banawa, maka penambahan kuantitas dan kualitas sampah juga meningkat. Hal ini sesuai dengan analisa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Donggala, yang mana diperkirakan pada tahun 2008 jumlah sampah yang berasal dari sampah rumah tangga, pasar dan sampah perkantoran akan mencapai 100,1 m³/hari.

Seperti diketahui bahwa pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Penataan Wilayah untuk Kota Donggala adalah sejak tahun 2001.

Sistem pelayanan sampah di Kota Donggala terdiri atas 2 sistem yaitu ;"sistem rute" yaitu pengambilan sampah langsung di tempat (door to door), dan sistem TPS bagi daerah yang sulit dilalui oleh kendaraan truk

pengangkut sampah pada kawasan-kawasan permukiman padat serta pasar.

Adapun metode pembuangan sampah di TPA Donggala dilakukan dengan sistem "*controlled landfill*". Sesuai dengan pedoman persampahan, maka sistem ini dipergunakan karena merupakan sistem yang berwawasan lingkungan. Sementara itu kegiatan pengumpulan dan pengangkutan dilakukan dengan sistem "*clean site*", yaitu pembersihan dan pengangkutan sampah secara langsung di jalan-jalan.

Kegiatan pengelolaan persampahan Kota Donggala yang dilaksanakan secara terencana sejak tahun 2001, dengan rincian jumlah timbulan sampah setiap tahunnya seperti tabel 2.

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi penambahan volume sampah di dalam Kota Donggala. Sehingga tersedianya sarana dan prasarana mutlak dibutuhkan baik kuantitas maupun kualitasnya untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan persampahan/ kebersihan.

Dengan volume timbulan sampah dan jumlah peralatan seperti tabel 4 , maka dapat dilihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sampah 5 tahun yang akan datang, dibutuhkan penambahan jumlah peralatan yang cukup besar. Seperti Tong Sampah, pada tahun 2008 dibutuhkan penambahan 82 % dari jumlah yang ada saat ini. Demikian pula dengan jumlah gerobak, TPS dan truk yang memerlukan penambahan masing-masing 65,93 %, 65,93 % dan 62,5 %.

Tabel 1. Perkiraan volume sampah di Kecamatan Banawa sampai tahun 2008

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	VOLUME SAMPAH (LITER/HARI)			VOLUME TOTAL	
		RUMAH TANGGA (1,40 LT/OR/HR)	PERDAGANGAN (0,50 LT/OR/HR)	PERKANTORAN (0,30 LT/OR/HR)	LITER / HARI	M ³ /HARI
2003	34.000	47.600	17.000	10.200	74.800	74,80
2008	45.500	63.700	22.750	13.650	100.100	100,10

Sumber : Revisi dan Perluasan RUTRK Kab. Donggala 2003.

Tabel 2. Jumlah timbulan sampah setiap tahun

NO	URAIAN	Volume pertahun (M ³)		
		2001	2002	2003
1	Volume timbulan sampah	4198	5293	7519

Sumber : Seksi Kebersihan Dinas KIMTAWIL Kab Donggala.

Tabel 3. Jumlah biaya pengelolaan sampah setiap tahun

NO	URAIAN	Pertahun (Rp)		
		2001	2002	2003
1	Biaya	104.113.300,-	104.849.000,-	107.000.000,-

Tabel 4. Kebutuhan sarana pelayanan persampahan di Kecamatan Banawa tahun 2008

TAHUN	VOLUME SAMPAH (M ³)	PELAYANAN (%)	VOLUME SAMPAH YANG TERANGKUT (M ³)	SARANA PENAMPUNG/PENGANGKUT			
				TONG SAMPAH (40 L)	GEROBAK (1 M ³)	TPS (1 M ³)	TRUK 2 RIT (6 M ³)
2003	74,80	80	59,84	1.870	60	60	5
2008	100,10	100	100,10	2.280	91	91	8

Sumber : Revisi dan Perluasan RUTRK Kab. Donggala 2003

Tabel 5. Tanggapan responden tentang jumlah tenaga pengelola kebersihan

No	Pendapat Responden	Jumlah (F)	Prosentase (%)
1	Memadai	12	12,00
2	Cukup memadai	44	44,00
3	Kurang memadai	39	39,00
4	Tidak memadai	5	5,00
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Kuesioner, Diolah Kembali, 2004

Tabel 6. Tanggapan responden tentang tingkat penguasaan tugas pengelola persampahan

No	Pendapat Responden	Jumlah (F)	Prosentase (%)
1	Memadai	18	18,00
2	Cukup memadai	41	41,00
3	Kurang memadai	32	32,00
4	Tidak memadai	9	9,00
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Kuesioner, Diolah Kembali, 2004

Adapun biaya yang dipergunakan dalam pengelolaan persampahan di Kecamatan Banawa selama ini seluruhnya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Karena sampai tahun 2003 Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten belum melakukan pungutan terhadap pengelolaan persampahan. Pungutan untuk retribusi sampah di Kecamatan Banawa selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Banawa. Jumlah biaya pengelolaan sampah setiap tahunnya disajikan pada Tabel 3.

4.2 Ketersediaan sumber daya manusia

Ketersediaan Sumber Daya Manusia ternyata juga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan persampahan, baik dalam segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini selain dirasakan oleh masyarakat, juga dirasakan oleh staf pengelola kebersihan dan persampahan pada Dinas Kimtawil Kabupaten Donggala dalam wawancara yang dilakukan. Tanggapan responden terhadap ketersediaan jumlah pengelola

kebersihan di lokasi studi disajikan pada tabel 5.

Selain kuantitas tenaga, maka kualitas tenaga pengelola juga menjadi aspek yang menentukan kinerja pengelolaan persampahan (tabel 6).

Hasil yang didapatkan pada tabel tersebut diatas, sangat berhubungan dengan tingkat pemahaman dan kemampuan yang dimiliki oleh staf pengelola yang ada saat ini. Dimana dari hasil wawancara yang dilakukan, seluruh komponen yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka belum pernah menerima pendidikan formal maupun informal tentang pengelolaan persampahan.

Demikian pula terhadap perlunya peningkatan kemampuan, seluruh komponen yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka menyadari sepenuhnya perlunya peningkatan kemampuan (*upgrading*) bagi mereka. Adapun bentuk sarana peningkatan kemampuan yang mereka harapkan, maka sebagian besar memilih dalam bentuk pelatihan-pelatihan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, didapatkan bahwa baik tenaga pengelola maupun warga masyarakat menyadari pentingnya arti peningkatan kemampuan bagi staf dan tenaga pengelola kebersihan

Tabel 7. Tanggapan responden tentang tingkat pendidikan formal tenaga pengelola kebersihan

No	Pendapat Responden	Jumlah (F)	Prosentase (%)
1	Memadai	16	16.00
2	Cukup memadai	29	29,00
3	Kurang memadai	34	34.00
4	Tidak memadai	21	21.00
J u m l a h		100	100%

Sumber : Data Kuesioner, Diolah Kembali, 2004

Tabel 8. Kompilasi tanggapan responden terhadap keberadaan sumber daya manusia pada pengelolaan persampahan/kebersihan

Tingkat Partisipasi	Frekuensi						Rata-rata	
	A		B		C		F	%
Memadai	12	12.00	18	18,00	16	16.00	15.33	15.33
Cukup Memadai	44	44.00	41	41,00	29	29,00	38.00	38.00
Kurang Memadai	39	39.00	32	32.00	34	34.00	35.00	35.00
Tidak Memadai	5	5.00	9	9,00	21	21.00	11.67	11.67
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Data Kuesioner, Diolah Kembali, 2004

Keterangan.

A. = jumlah

B. = penguasaan tugas

C. = tingkat pendidikan formal.

4.3 Sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan kebersihan dan persampahan merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki. Mengingat pengelolaan kebersihan dan persampahan merupakan suatu proses manajemen yang harus direncanakan, dilaksanakan dan dikontrol dengan baik, maka sarana dan prasarana sangat menunjang kinerja kegiatan ini.

Saat ini keberadaan sarana prasarana pengelolaan kebersihan dan persampahan pada Dinas Kimtawil Kabupaten Donggala dapat dilihat pada tabel 9.

Untuk menunjang kelancaran pengelolaan sampah di Kota Donggala, maka disamping dibutuhkan sumber daya manusia, maka harus didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang fungsi dan tugas pengelolaan kebersihan dan persampahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Adapun pendapat responden atas sarana dan prasarana milik Pemerintah Kabupaten Donggala berupa tempat pembuangan sampah yang ada saat ini dirasakan cukup memadai seperti dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 9. Sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan dan persampahan Dinas Kimtawil Kabupaten Donggala.

NO	URAIAN	2003	
		VOLUME	SATUAN
1	TPA	2	HA
2	TPS	14	BUAH
3	GEROBAK DORONG	33	BUAH
4	DUMP TRUCK	2	UNIT
5	ARM ROLL	1	UNIT
6	BULLDOZER	1	UNIT
7	KONTAINER	3	BUAH
8	TONG SAMPAH	220	BUAH
9	PEMOTONG RUMPUT	1	UNIT
10	SEKOP	12	BUAH
11	PENGAIT	5	BUAH

Sumber : Seksi Kebersihan Dinas KIMTAWIL Kab Donggala

Tabel 10. Tanggapan responden tentang ketersediaan tempat pembuangan sampah.

No	Pendapat Responden	Jumlah (F)	Prosentase (%)
1	Memadai	10	10.00
2	Cukup memadai	51	51.00
3	Kurang memadai	22	22.00
4	Tidak memadai	17	17.00
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Kuesioner, Diolah Kembali, 2004

Tabel 11. Tanggapan responden tentang ketersediaan sarana pengumpul sampah

No	Pendapat Responden	Jumlah (F)	Prosentase (%)
1	Memadai	17	17.00
2	Cukup memadai	54	54.00
3	Kurang memadai	23	23,00
4	Tidak memadai	6	6,00
J u m l a h		100	100%

Sumber : Data Kuesioner, Diolah Kembali, 2004

Tabel 12. Tanggapan responden tentang ketersediaan peralatan pendukung

No	Pendapat Responden	Jumlah (F)	Prosentase (%)
1		24	24.00
2	Memadai	53	53.00
3	Cukup memadai	12	12.00
4	Kurang memadai Tidak memadai	11	11.00
J u m l a h		100	100%

Sumber : Data Kuesioner, Diolah Kembali, 2004

Tabel 13. Tanggapan responden tentang metode kerja pengelolaan persampahan

No	Pendapat Responden	Jumlah (F)	Prosentase (%)
1	Memadai	14	14.00
2	Cukup memadai	59	59.00
3	Kurang memadai	18	18.00
4	Tidak memadai	9	9.00
J u m l a h		100	100%

Sumber : Data Kuesioner, Diolah Kembali, 2004

Sementara pendapat responden mengenai sarana dan prasarana pengumpul sampah yang terdiri dari kontainer, truk pengangkut, arm roll, yang ada saat ini, dapat dilihat pada Tabel 11

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pengelola persampahan, yang sebagian besar menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada saat ini memadai dan dapat menunjang tugas mereka sehari-hari.

Adapun tanggapan responden tentang metode kerja pengelolaan

persampahan/kebersihan yang dilaksanakan saat ini disajikan pada Tabel 13.

Dengan hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan, didapat bahwa pada dasarnya sebagian besar pendapat yang dikemukakan baik oleh staf seksi kebersihan, tenaga pengelola kebersihan maupun masyarakat menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada saat ini cukup memadai.

Hal ini merupakan suatu kenyataan yang baik bagi pengelolaan persampahan/kebersihan, dimana dari

segi sumber daya, telah dapat di penuhi salah satu kebutuhan mendasar dalam pengelolaan persampahan/kebersihan, yaitu sarana dan prasarana.

4.4 Partisipasi

Partisipasi sebagai salahsatu faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan pengelolaa persampahan, sangat terlihat jelas dari tabel 20b berikut. Pada tabel tesebut dapat dilihat bahwa seluruh responden mengerti dan memahami tentang pentingnya arti kebersihan serta peranserta mereka dalam rangka ikut mengelola

kebersihan. Hal ini sekali lagi merupakan suatu faktor pendukung utama dalam keberhasilan pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Seksi Kebersihan, sehingga saat ini kembali pada pengelola kebersihan untuk menyikapi kesadaran tentang kebersihan yang telah tumbuh dimasyarakat tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Adapun pendapat responden tentang kesadaran untuk menyediakan sarana pembuangan sampah sendiri dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 14. Kompilasi tanggapan responden terhadap seluruh sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam pengelolaan persampahan/kebersihan

Tingkat Partisipasi	Frekuensi								Rata-rata	
	A		B		C		D			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Memadai	10	10.00	17	17,00	24	24.00	14	14.00	16.25	18,25
Cukup Memadai	51	51.00	54	54,00	53	53.00	59	59.00	54.25	54,25
Kurang Memadai	22	22.00	23	23,00	12	12.00	18	18.00	18.75	18,75
Tidak Memadai	17	17.00	6	6,00	11	11.00	9	9.00	10.75	10,75
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Data Kuesioner, Diolah Kembali, 2004

Keterangan.

A. = Tempat pembuangan sampah

B. = Sarana pengumpul

C. = Peralatan pendukung.

D. = Metode kerja.

Tabel 15. Tanggapan responden tentang keterlibatan masyarakat dalam menyediakan sarana pembuangan sampah sendiri

No	Pendapat Responden	Jumlah (F)	Prosentase (%)
1	Sangat baik	5	5.00
2	Cukup baik.	41	41.00
3	Kurang baik	30	30.00
4	Tidak baik	24	24.00
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Kuesioner, Diolah Kembali, 2004

Tabel 16. Tanggapan responden tentang keterlibatan masyarakat dalam membuang sampah ditempat yang telah disediakan

No	Pendapat Responden	Jumlah (F)	Prosentase (%)
1	Sangat baik	8	8.00
2	Cukup baik.	52	52.00
3	Kurang baik	24	24.00
4	Tidak baik	16	16.00
J u m l a h		100	100%

Sumber : Data Kuesioner, Diolah Kembali, 2004

Tabel 17. Tanggapan responden tentang keterlibatan masyarakat dalam mencermati perkembangan pengelolaan persampahan.

No	Pendapat Responden	Jumlah (F)	Prosentase (%)
1	Sangat baik	-	-
2	Cukup baik.	56	56.00
3	Kurang baik	23	23.00
4	Tidak baik	21	21.00
J u m l a h		100	100%

Sumber : Data Kuesioner, Diolah Kembali, 2004

Tabel 18. Kompilasi tanggapan responden tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan/kebersihan

Tingkat Partisipasi	Frekuensi								Rata-rata	
	A		B		C		D			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Memadai	6	6.00	5	5.00	8	8.00	-	-	4.75	4.75
Cukup Memadai	46	46.00	41	41.00	52	52.00	56	56.00	48.75	48.75
Kurang Memadai	31	31.00	30	30.00	24	24.00	23	23.00	27	27.00
Tidak Memadai	17	17.00	24	24.00	16	16.00	21	21.00	19.5	19.50
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Data Kuesioner, Diolah Kembali, 2004

Keterangan.

A. = Menjaga lingkungan.

B. = Menyediakan sarana pembuangan sampah sendiri.

C. = Membuang sampah ditempat yang telah disediakan.

D. = Mencermati perkembangan pengelolaan persampahan.

Dari hasil kuesioner didapatkan data bahwa kesadaran masyarakat untuk membuang sampah yang telah disediakan cukup tinggi seperti

digambarkan pada tabel 16 , tabel 17 dan tabel 18.

4.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengukuran tingkat pendapat responden terhadap keberadaan sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan kebersihan/persampahan, pendapat responden

tentang sarana dan prasarana serta pendapat responden tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan/kebersihan, dapat dilihat pada tabel 19, tabel 20 dan tabel 21.

Tabel 19. Kompilasi tanggapan responden tentang sumber daya manusia pengelola kebersihan / persampahan

INTERVAL SKOR	FREKUENSI (fi)	NILAI TENGAH BOBOT (xi)	fi . xi
3.1 – 4.0	15.33	3.55	54.42
2.1 – 3.0	38	2.55	96.90
1.1 – 2.0	35	1.55	54.25
0 – 1.0	11.67	0.55	6.42
	100		211.99

Sumber : Data Kuesioner, Diolah Kembali, 2004

$$\Sigma fi \cdot xi / \Sigma fi = 211.99 / 100 = 2.12 \text{ (Tinggi)}$$

Tabel 20. Kompilasi tanggapan responden tentang sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan / persampahan

INTERVAL SKOR	FREKUENSI (fi)	NILAI TENGAH BOBOT (xi)	fi . xi
3.1 – 4.0	16.25	3.55	57.67
2.1 – 3.0	54.25	2.55	138.34
1.1 – 2.0	18.75	1.55	29.06
0 – 1.0	10.75	0.55	5.91
	100		230.98

Sumber : Data Kuesioner, Diolah Kembali, 2004

$$\Sigma fi \cdot xi / \Sigma fi = 230.98 / 100 = 2.31 \text{ (Tinggi)}$$

Tabel 21. Kompilasi Tanggapan responden tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan / persampahan

INTERVAL SKOR	FREKUENSI (fi)	NILAI TENGAH BOBOT (xi)	fi . xi
3.1 – 4.0	4.75	3.55	16.86
2.1 – 3.0	48.75	2.55	124.31
1.1 – 2.0	27	1.55	41.85
0 – 1.0	19.5	0.55	10.73
	100		193.75

Sumber : Data Kuesioner, Diolah Kembali, 2004

$$\Sigma fi \cdot xi / \Sigma fi = 193.75 / 100 = 1.94 \text{ (Sedang)}$$

4.6 Faktor-faktor penunjang, penghambat dan alternatif pemecahannya

- Faktor penunjang
Adapun beberapa faktor penunjang atau yang menjadi kekuatan pendorong yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang, khususnya untuk meningkatkan kebersihan kota, adalah terdiri dari :
 - a. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan persampahan dan kebersihan.
 - b. Adanya motivasi petugas operasional yang dapat dikembangkan.
 - c. Adanya program Donggala Kota ANTIK
 - d. Kebersihan sudah merupakan kebutuhan
 - e. Adanya pemasukan dana yang didapat dari retribusi sampah.Faktor-faktor tersebut di atas adalah merupakan faktor yang mempengaruhi terlaksananya program kerja Dinas Kimtawil di dalam mewujudkan kebersihan Kecamatan Banawa.
- Faktor penghambat
Adapun faktor-faktor penghambat yang dimaksud terdiri dari :
 - a. Masih adanya masyarakat yang kurang kesadarannya terhadap kepedulian lingkungan, utamanya kebersihan dan keindahan kota.
 - b. Masih kurangnya personil petugas kebersihan kota.
 - c. Masih kurangnya peralatan/perlengkapan petugas kebersihan kota.
 - d. Terbatasnya dana untuk operasional pengelolaan kebersihan.
 - e. Medan kerja yang sebagian berada di perbukitan, sehingga sedikit menyulitkan operasional.

Faktor-faktor penghambat/masalah tersebut diatas perlu diupayakan untuk diantisipasi untuk masa-masa yang akan datang.

- Alternatif pemecahan masalah
Berbagai hal yang ditemui haruslah ditanggulangi lewat penerapan sistem pemecahan masalah yang terpadu, dengan memperhatikan dampak terhadap aspek-aspek lainnya.
Tindakan dan strategi penanggulangan permasalahan yang berkaitan dengan Kinerja Dinas Kimtawil dalam pengelolaan kebersihan Kota Donggala di Kecamatan Banawa, haruslah ditangani dalam lingkungan yang menyeluruh, dalam arti kendala yang ditemui ditanggulangi lewat penerapan sistem pemecahan masalah yang terpadu, sehingga diharapkan strategi pemecahan masalah yang diterapkan akan mampu menanggulangi secara tepat hambatan yang akan muncul. Oleh karena hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Kimtawil dalam pengelolaan kebersihan kota bersumber dari faktor partisipasi masyarakat, maka sosialisasi khususnya penyuluhan pengelolaan kebersihan harus ditingkatkan. Alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil antara lain sebagai berikut :
 - a. Perlunya dilakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi langsung di lapangan kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
 - b. Perlu dilakukan pendekatan pada Tokoh-tokoh Masyarakat tentang program kerja pengelolaan persampahan.
 - c. Ditingkatkannya kerjasama kepada semua institusi, baik

- Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Pemerintah Daerah lainnya.
- d. Perlu adanya penambahan personil petugas kebersihan.
 - e. Perlu adanya penambahan perlengkapan/peralatan kebersihan, serta dengan pembagian frekuensi pelayanan, intensifikasi penggunaan kendaraan pengangkutan sampah secara efektif dan efisien serta peningkatan pemeliharaan kendaraan.
 - f. Perlu diterapkan secepatnya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, sehingga akan dihasilkan pemasukan yang dapat menutupi biaya operasional pengelolaan persampahan setiap tahunnya, serta adanya pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dari pemaparan dan uraian yang penulis sajikan, khususnya menyangkut pengelolaan kebersihan kota di Kecamatan Banawa, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut :

- a. Pengelolaan persampahan di Kota Donggala telah berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari indikator yang berhubungan dengan variabel sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada saat ini. Kecuali variabel partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan / kebersihan menunjukan indikator yang masih dirasakan kurang.
- b. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan persampahan di Kota Donggala

menunjukan bahwa kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat seperti kegiatan sosialisasi masih sangat kurang dilakukan. Hal ini ditunjukan dengan indikator yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kategori sedang. Demikian pula indikator yang berkenaan dengan tingkat pendidikan staf dan tenaga kebersihan, yang masih menunjukan persentasi kurang memadai yang masih cukup besar.

5.2 Saran

- Dinas Permukiman dan Penataan Wilayah harus melakukan strategi-strategi, seperti ;
 - a. Membangun tempat-tempat pembuangan sementara disekitar Kota Donggala.
 - b. Membuat metode kerja yang tepat untuk setiap karakter wilayah yang berbeda.
 - c. Segera melaksanakan PERDA No. 10 tahun 2003 tentang pengelolaan persampahan / kebersihan Kota Donggala.

Selain itu juga harus dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan/kebersihan serta peningkatan kemampuan penguasaan kerja bagi staf pengelola dan terutama pada tenaga kebersihan, seperti mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan atau kegiatan magang.

- Harus senantiasa melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan persampahan/kebersihan pada masyarakat, dengan mengikutsertakan aparat kecamatan, kelurahan dan tokoh-tokoh masyarakat, terutama terhadap anak-anak yaitu melalui

proses pendidikan tentang kebersihan yang diberikan sejak anak-anak.

6. Daftar Pustaka

- Azwar A., 1979, *Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Mutiara. Jakarta
- Arikunto S., 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- , Balai Pelatihan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman. *Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan*.
- , Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala, 2002, *Kecamatan Banawa Dalam Angka*.
- , Bagian Hukum Setkab Donggala, 2001, *Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001*.
- , Bagian Organisasi Setkab Donggala, 2003, *Keputusan Bupati Donggala tentang TUPOKSI Dinas KIMTAWIL*. Setkab Donggala.
- Davey .K J., 1988, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Dewan Standarisasi Nasional, 1994, *Tata Cara Pengelolaan Sampah Di Pemukiman*. SNI 03 - 3242 - 1994.
- Dewan Standarisasi Nasional, 1994, *Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah*. SNI 03 - 3241 - 1994.
- Departemen Pekerjaan Umum, 1990, *Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan*. SK SNI T - 13 - 1990 - F. Yayasan LPMB, Bandung.
- Departemen Pekerjaan Umum, 1986, *Materi Training Untuk Tingkat Staf Teknis Proyek PLP Sektor Persampahan*. Dharma Consultant. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia..* Balai Pustaka. Jakarta.
- Dunn, W. N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua, 2000, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dunn W. N. *Analisis Kebijakan Publik*, 2003, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.
- Hadi S. P., 2001, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Koestoer R. H. dkk., 2001, *Dimensi Keruangan Kota, Teori dan Kasus*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Martoyo S., 1996, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. BPFE. Yogyakarta.
- , Pemerintah Kabupaten Donggala, 2003, *PERDA Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan*.
- Mochtar M. 1987. *Kesehatan Masyarakat*. Yayasan Karya Dharma IIP. Jakarta.
- , Program Pascasarjana, 2003, *Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi*. Universitas Hasanuddin.
- , PT. Yodya Karya, 2001, *D.E.D Sistem Penyediaan Sarana Air Bersih Kota Donggala*.

- Putra F. 2003, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Rakhmat M. S., 1999/2000, *Teori Administrasi Publik*, Program Pascasarjana Magister Administrasi, Kerjasama UNHAS – LAN dengan UNTAD PEMDA, Prov. Sulawesi Tengah.
- , *Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala*. 1998, Revisi dan Perluasan RUTRK.
- Siagian S. P. ,2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soetrisno L. ,1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Sugiyono, 1999, *Metode Penelitian Administratif*. Alfabeta, Bandung.
- Syafiie, I.K., Tandjung, Dj., Modeong, S., 1999, *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suratmo, F.G., *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, 1991, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Thoha M, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, 2003, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , *Undang Undang R.I. Nomor 22 tahun 1999*, 2002, Djambatan. Jakarta.
- , *Undang Undang R.I. Nomor 25 tahun 1999*. 2002, Djambatan. Jakarta.
- Wibawa S, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, 1994, Intermedia, Jakarta.